

## Posisi Strategis Media Massa dan Perannya dalam Proses Komunikasi Politik

Faisal Dudayef<sup>1</sup>, Rangga G. Gumelar<sup>2</sup>, Nia Kania Kurniawati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*Corresponding author

E-mail: Fdudayef@gmail.com

### Article History:

Received: 8 Jan 2024

First Review: 15 Jan 2024

Last Review: 24 Jan 2024

Revised: 28 Jan 2024

Accepted: 2 Feb 2024

**Abstract:** Keberadaan media massa dalam konteks komunikasi politik memiliki peran penting. Hal ini sejalan dengan proses transformasi politik otoritatif menuju era reformasi di mana ekspresi kebebasan yang tak terhindarkan menjadi dasar bagi pembentukan kehidupan warga negara yang demokratis. Media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan politik kepada publik secara signifikan, karena media massa memiliki beberapa keunggulan seperti media massa memiliki jangkauan yang luas kepada publik dan secara langsung mempengaruhi penerima pesan. Selain itu, media massa mempengaruhi publik tentang apa yang mereka anggap penting. Media massa tidak dapat menentukan apa yang harus dipikirkan, tetapi mempengaruhi apa yang harus dipikirkan. Dengan memilih berita tertentu dan mengabaikan yang lain, media membentuk citra dunia kita seperti yang disajikan oleh media. Oleh karena itu, wajar jika keterlibatan media massa dalam pengembangan sistem politik dan demokrasi tertentu sangat penting.

### Keywords:

Komunikasi, Politik, Media, Media Massa

### Pendahuluan

Sekarang ini, media massa sangat berperan dalam proses transformasi politik. Media memainkan peran penting dalam membantu orang mengembangkan pengetahuan

tentang bagaimana berperilaku politik. Bahkan media massa selalu dihadapkan pada lingkungan politik yang dinamis karena mereka menyesuaikan diri dengan gejolak politik sejak masa pasca-Orde Baru. Keadaan ini menyebabkan perubahan dalam perilaku politik masyarakat. Salah satu faktornya adalah keberadaan media yang meliput perubahan politik; Karena pers diizinkan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, biasanya mengambil sikap independen. Ini adalah kekuatan pendorong pergeseran perilaku politik masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia.

Banyak isu yang terkait dengan fanatisme politik di antara individu didorong oleh dampak signifikan media. Apabila dilihat melalui lensa akademisi jelas ini sangat menarik. Dimensi media massa justru merupakan aspek yang sangat menarik namun belum mendapat digandrungi oleh para peneliti dan pengamat politik. Melalui tahapan eksternalisasi, subyektivitas, dan internalisasi yang terjadi dalam proses konstruksi media massa sebagai media politik, apabila kita mengamati berbagai tayangan yang dimuat di media massa, terutama yang bermuatan politik melalui proses dekonstruksi juga interpretasi ini akan menjadi realitas sosial baru dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari sudut pandang media komunikasi modern Indonesia, keberadaan media massa menemui beberapa dilema tentang seruan reformasi media massa. Idy Subandy Ibrahim, seorang spesialis komunikasi politik, mencatat bahwa komunikasi politik pascareformasi ditandai dengan perpaduan politik dengan budaya populer (Ibrahim, 2007). Di sini, kebebasan pers merupakan salah satu komponen demokrasi yang akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Media massa, terutama keberadaan media yang juga mempengaruhi perilaku politik, memberikan kontribusi besar bagi konstruksi kesadaran, pemahaman, dan aktivitas politik masyarakat. Dengan pensiunnya Suharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998, masyarakat memulai era baru yang dikenal sebagai era reformasi, yang memunculkan liberalisasi dan relaksasi politik. Lanskap politik bangsa melihat paradigma yang mendalam dan perubahan

sistemik selama ini (Effendi, 2000).

Persoalan-persoalan yang turut membersamai pola dan intensitas berpolitik diantara kalangan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh besarnya pengaruh media massa. Hal ini menarik untuk ditelaah dan dikaji dalam paradigma dan perspektif akademik. Justru aspek yang cukup menarik namun belum mendapat perhatian dari kalangan akademisi yang baik, adalah pada dimensi media massa. Hal ini bisa dianggap menarik karena pola politik media massa terkadang sulit diukur melalui pendekatan media dan kaitannya dengan perilaku politik secara normatif bahkan empiris.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka artikel ini berusaha merumuskan bagaimana peran media massa membentuk kesadaran politik masyarakat, apakah pemberitaan politik media massa mendukung kegiatan berpolitik masyarakat dan bagaimana politikus membentuk citra dirinya melalui media dalam kegiatan politik dalam masyarakat.

## **Metode**

Pendekatan atau metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1999). Dalam artikel ini, penulis akan memilah mana saja instrument yang sesuai dengan topik pembahasan artikel. Data akan diperoleh melalui artikel jurnal, berita di media digital atau cetak, buku, dan lainnya yang dapat menunjang kelengkapan data yang dibutuhkan dalam proses penulisan artikel tentang media massa dan perannya dalam proses komunikasi politik.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan tinjauan penulis terhadap berbagai karya akademis, komunikasi politik biasanya dikaitkan dengan keterlibatan media massa dalam proses komunikasi. Ini menunjukkan fakta bahwa kampanye politik yang bertujuan untuk memenangkan suara atau mengkonsolidasikan kekuatan politik terus mendominasi surat kabar dan publikasi di media sosial yang kebanyakan berkaitan dengan komunikasi politik.

Dampak media cetak maupun media massa yang berifat elektronik pada kampanye pemilu tidak dapat dihindari. Akibatnya, metode analisis yang digunakannya juga lebih memanfaatkan analisis media massa, terutama dalam hal teori-teori tentang hubungan antara media dan masyarakat. Ini termasuk teori tentang pesan, proses penyebaran informasi, dan konsekuensi psikologis dan sosiologis yang akan dihasilkan. Kraus dan Davis pernah berbicara melalui bukunya yang berjudul *"The Effects of Mass Communication on Political Behavior"*, yang diterbitkan pada tahun 1959 dan berusaha menunjukkan bahwa media juga membentuk realitas sosial politik (Kraus dan Davis, 1975).

Sementara, Graber percaya bahwa komunikasi politik adalah proses menyadari, menerima, dan setuju dengan institusi, norma, dan pengaruh luar yang membentuk kehidupan politik. Isu-isu dengan komunikasi politik juga diamati oleh Dan D. Nimmo dan Keith Sanders dalam *"Handbook of Political Communication"* (1981) ketika tindakan politik yang sebenarnya dikaitkan dengan keterlibatan media massa. Dan Nimmo juga menjelaskan bahwa pengaruh politik dimobilisasi dan dikomunikasikan antara entitas pemerintah formal dan komunikasi, memilih masyarakat dalam kerangka komunikasi politik.

Komunikasi politik, secara teori mencakup semua jenis komunikasi yang digunakan dengan tujuan menyebarkan pesan politik dari pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan dukungan rakyat. Ini tidak hanya terbatas pada peristiwa politik seperti pemilihan umum. Secara teoritis, seperti disebutkan sebelumnya, fenomena

komunikasi politik dalam suatu masyarakat merupakan komponen penting dari dinamika politik di mana ia terjadi. Akibatnya, tidak mungkin memisahkan upaya komunikasi politik Indonesia dari proses politik nasional yang menjadi landasan eksistensinya.

Gagasan tentang "revolusi partisipasi" telah dimodifikasi untuk memahami dasar-dasar intelektual pertempuran politik di Indonesia. Keterlibatan politik organisasi massa, yang memuncak pada awal 1990-an dan tumbuh semakin tak terbendung menjelang suksesi 1997. Pada kenyataannya, semua itu dimodifikasi dari gagasan "revolusi partisipasi". Kemajuan teoritis dalam penelitian ilmu politik tentang asal-usul gagasan partisipasi politik dan ciri-ciri teori partisipasi politik dengan fokus kepada negara-negara Barat. Ini semua akan sulit dihindari karena, teori partisipasi politik Barat umumnya menunjukkan karakteristik miring dan berorientasi kepada negara barat itu sendiri. Teori partisipasi politik adalah salah satu yang dapat dimodifikasi dan diterapkan dalam situasi ini (Patterson, 1975). Enurut Blake dan Haroldaen, komunikasi politik adalah komunikasi yang memiliki pengaruh aktual dan potensial terhadap berfungsinya suatu pernyataan politik atau entitas politik lainnya, menurut Blake dan Haroldaen dalam "*A Taxonomy of Concepts in Communication*" (Blake dan Haroldaen, 1975). Sedangkan Dan Nimmo menggambarkan komunikasi politik sebagai "kegiatan komunikasi yang mengatur aktivitas manusia dalam situasi konflik berdasarkan konsekuensinya, baik aktual maupun potensial" (Nimmo, 2000).

Dalam prinsip komunikasi politik, da beberapa hal yang harus dapat diperhatikan, yang pertama adalah konsistensi. Saat berkomunikasi secara politik, apa yang dituturkan harus sejalan dengan platform partai, paradigma partai, dan jawaban yang ditawarkan untuk masalah publik dan konstituen. Kedua, yaitu Replikasi. Informasi harus diulang dalam komunikasi politik agar publik dan konstituen dapat sepenuhnya memahami platform partai dan penyebab yang

didukungnya. Ketiga dan terakhir adalah *Evidence*. Ketika sebuah partai politik berkomunikasi, informasi yang disampaikan harus dapat diverifikasi kebenarannya.

Dalam hal yang sama, para aktor politik perlu menyajikan bukti yang dapat diverifikasi atas tindakan yang ia lakukan, baik dulu maupun sekarang. Menurut Halloran, sebagian besar makalah komunikasi tidak mencapai keseimbangan antara membahas efek komunikasi dan keterlibatan komunikator dalam menyusun konten pesan. Misalnya, publikasi dalam komunikasi massa cenderung membahas persepsi audiens tentang pengaruh media massa daripada faktor-faktor yang benar-benar memengaruhi konten media massa itu sendiri.

Pentingnya media massa dalam penyebaran politik pernah juga diungkapkan Reese dan Shoemaker setelah melakukan upaya untuk mengklarifikasi variabel yang memiliki dampak signifikan pada konten media massa. Mereka menyatakan bahwa banyak elemen berdampak pada konten media, seperti pengaruh personel media (jurnalis atau penyiar), organisasi media, pengaruh ekstramedia, dan pengaruh ideologis (Shoemaker dan Reese, 1996). Reese dan Shoemaker dalam karyanya seolah berusaha untuk menunjukkan pengaruh aktor atau "siapa", "kelompok yang mempengaruhi media massa", dan "seorang komunikator politik" dalam menyebarkan konten serta isi pesan sehingga dapat mempengaruhi khalayak.

Nimmo mengategorikan komunikator politik menjadi tiga kelompok: politisi, profesional, dan aktivis, mengingat peran penting yang dimainkan komunikator dalam menentukan konten media. Dalam setiap perilaku mereka, politisi sebagai komunikator politik bergantian menjadi perwakilan partai dan ideolog. Komunikator politik akan bernegosiasi dan berkompromi tentang permasalahan politik atas nama kelompok tertentu sebagai bagian dari masyarakat. Tindakan mereka dimotivasi dengan mencoba mempengaruhi ide orang lain, mempromosikan perubahan, atau menghambat kemajuan. Mereka bertindak sebagai perantara, meyakinkan orang lain

untuk mengadopsi sudut pandang yang mereka sajikan (Arifin, 2003).

Dalam buku Komunikasi *Political Communication, Issues and Strategies for Research*, salah satu buku yang mengeksplorasi dasar-dasar teoritis komunikasi politik. Buku yang disunting Steven H. Chaffee dari tahun 1975 mengungkapkan bagaimana situasi dalam subjek yang masih terbatas pada tindakan politik dunia nyata dan hanya terfokus pada politik-politik yang sifatnya praktis. Pada beberapa literatur, dari komunikasi akan menghasilkan sejumlah teori tindakan komunikatif terkait dengan rasio dan rasionalisasi masyarakat, yang berfungsi sebagai dasar untuk operasionalisasi komunikasi politik. Jürgen Habermas juga pernah menulis *Theori des Kommunikativen Handelns*, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa Teori Tindakan Komunikatif memiliki tiga tujuan yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya: 1) Ciptakan gagasan rasionalitas yang independen dari prinsip subjektif teori dan filsafat sosial kontemporer. 2) Membedah gagasan peradaban dua tingkat yang menggabungkan paradigma sistem dengan dunia kehidupan. 3) Dengan menggunakan informasi latar belakang yang diberikan di atas, kembangkan teori kritis modernitas yang meneliti dan membahas gangguan dengan cara yang lebih bernuansa atau dengan bahasa lain “mensketsakan” (Habermas, 1981).

Menurut Allan G. Johnson mengenai sistem sosial dalam struktur organisasi di sisi lain, memperkuat pengaruh seorang aktor. Jika sudut pandang ini diterima, akan tampak bahwa kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan politik yang logis secara signifikan dipengaruhi oleh aksesnya ke sumber berita politik yang tersedia di media massa. Pada kenyataannya, liputan-liputan media massa masih memiliki dampak signifikan pada logika masyarakat ketika datang untuk membuat keputusan politik. Keputusan politik yang mementingkan rasionalitas dibuat atas dasar hati nurani atau preferensi individu, terlepas dari pengaruh luar. Allan G. Johnson berpendapat bahwa kepentingan aktor yang tetap terjalin dengan struktur sosial, akan mendorong pengambilan keputusan yang rasional (Johnson, 1995).

Analisis wacana dan metode yang digunakan untuk menyelidiki wacana politik, dikembangkan oleh media. Selain isyarat lisan dan nonverbal, wacana mencakup berbagai "teks" dalam arti kata yang paling luas. Dari sudut pandang ekstralinguistik, istilah "teks" dapat diperluas untuk mencakup pesan yang dibuat melalui sistem tanda, termasuk kode indikator listrik, sinyal lampu lalu lintas, ritual keagamaan, upacara, atau norma, pakaian, atau gerakan komunitas tertentu (Thiselton, 1992).

Secara lisan atau tulisan, biasa atau terperinci, sebagian besar komunikasi terdiri dari gerakan rumit yang disebut "pesan" atau "wacana". Analisis wacana adalah istilah yang digunakan untuk menyelidiki struktur pesan. Ada tiga bagian yang harus difahami dalam hal ini menurut pendapat Scott Jacobs, diantaranya adalah: Pertama, analisis wacana disusun sesuai dengan pedoman dan metode khusus oleh komunikator sehingga makna yang dimaksudkan dapat dipahami. Kedua, Analisis wacana dianggap sebagai masalah tindakan. Akibatnya, pengguna bahasa menyadari kendala tata bahasa dan pragmatis tentang penggunaan unit yang lebih besar dalam konteks sosial tertentu. Ketiga, analisis wacana dipandang sebagai penyelidikan terhadap prinsip-prinsip yang diterapkan oleh komunikator dari sudut pandang mereka; Dengan kata lain, analisis wacana berkaitan dengan aturan pesan yang mengatur transaksi pesan itu sendiri (Littlejohn, 1999).

Sudut pandang yang disebutkan di atas menunjukkan kepada kita bahwa wacana politik, apakah itu diperoleh secara langsung atau tidak langsung, melalui survei, wawancara, atau media seperti analisis konten, adalah analisis bertingkat. Dengan kata lain, analisis wacana politik memperhitungkan semua situasi di sekitarnya selain hanya membahas konten dari media massa entah itu lisan atau tulisan.

Analisis multilevel biasanya digunakan dalam analisis wacana media. Dalam situasi khusus ini, Fairdough menegaskan bahwa seorang peneliti perlu menyadari

elemen ekstramedia dan kontekstual selain informasi tekstual. Ia menciptakan frasa "Analisis Wacana Kritis" untuk memperkenalkan gagasan analisis intertekstualitas. Metode ini dikenal sebagai "wacana" karena ahli bahasa, cendekiawan, dan profesional dalam ilmu sosial menggunakannya sebagai konsep. Keberadaannya diakui memiliki hubungan sebab-akibat yang disadari bahkan dalam keadaan normal, itulah sebabnya ia dijuluki "kritis" (kritis), baik dalam praktik sosial umumnya maupun dalam penggunaan bahasa secara khusus. Percakapan ini selalu tentang penggunaan bahasa, tertulis dan lisan (Fairdough, 1995).

Van Dijk mengklaim bahwa analisis wacana kritis lebih menekankan pada unsur-unsur sosiohistoris yang mengelilingi struktur teks. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang konteks sosiokultural di sekitar seluruh teks serta berbagai aspek struktur organisasi dan proses produksi teks melalui apa yang tertuang di dalam media massa. Sementara itu, media mengubah kehidupan masyarakat untuk menciptakan hiperrealitas yang terintegrasi ke dalam struktur masyarakat yang berbeda. Hal ini terutama terlihat dalam cara internet dan televisi telah menggantikan peran sosial manusia. Kesadaran publik harus ditingkatkan melalui saluran informasi media massa agar media massa berfungsi sebagai kendaraan untuk pendidikan politik. Dengan demikian, jelas bahwa media harus berperan aktif dalam setiap aktifitas perpolitikan tanah air.

## **Kesimpulan**

Media massa memiliki peran penting dalam politik modern, berfungsi sebagai komponen penting dan dapat titik fokus di lapangan perpolitikan aktor dan masyarakat. Penting untuk mendistribusikan rancangan kebijakan sehingga publik menyadarinya dan dapat terlibat dalam perdebatan tentang politik dalam berbagai forum diskusi publik. Penting juga untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan tujuan dari politik yang bervariasi. Semuanya pasti memiliki media atau saluran untuk

dikomunikasikan, salahsatunya alah media massa. Untuk kepentingan politik masyarakat dan para politikus, media massa adalah sarana komunikasi politik yang populer. Ini adalah hasil dari cara media massa beroperasi yang dimana ia dapat menyebarkan informasi apapun secara luas, menjangkau berbagai lapisan, dan meningkatkan pesan (informasi dan citra) dalam jumlah yang besar dan masiv. Penyebaran pesan-pesan politik melalui media massa memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku politik masyarakat. Kepercayaan publik dapat muncul karena warga negara secara aktif berpartisipasi dalam urusan sipil dan demokrasi yang terpelihara. Ketersediaan informasi merupakan prasyarat untuk keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan politik, dan media massa adalah jalan atau media yang paling efisien untuk penyebaran informasi.

### **Daftar Referensi**

- Arifin, Anwar. (2003). *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Blake dan Haroldaen. (1975). "*Critical Events Analysis*" dalam *Political Communication: Issues and Strategies for Research*. terbitan London.
- Bungin, Burhan. (2003). *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Tekhnologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Chaffee, Steven H. (1975). *Political Communication, Issues and Strategies for Research*.
- Feith, Herbet., dan Lance Castles. (1970). *Indonesian Political Thinking 1945- 1965*. Cornell University Press.
- Habermas, Jurgen. (1981). *Theori des Kommunikativen Handelns*. Suhrkamp Verlag.
- Hikayat, M.Mahi. (2010). *Komunkasi Politik, Teori dan Praktek*. Jakarta:Simbiosis Rekatama Media.
- Kraus dan Davis. (1959). *The Effects of Mass Communication on Political Behaviour*.
- Knapp, Mark L. (1972). *Nonverbal Communication in Human Interaction*. Free Pres.
- Krippendorff, Klaus. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Littlejohn, Stephen W. (2002). *Theoris of Human Communication (sevent edition)*. New Mexico.

Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyana, Deddy. *Komunikasi politik: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosda. 2001.

Nimmo, Dan. (2000). *Political Communication and Public Opinion and America*. diterbitkan Goodyear Pubhling. edisi Bahasa Indonesia. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek, Bandung; Rosda Karya.

Patterson, Samuel C. (1998). *A More Perfect Union: Introduction to American Government*. Oxford.

Pawito. (2009). *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta : Jalasutra.

Reed H., Blake, and Edwin O. Haroldaen. (1975). *A Taxonomy of Concepts in Communication*. New York: Hasting House Publiahers.

Ruben, Brent D. (1992). *Communication and Human Behavior*. 3rd edition. Prentice Hall Englewood Diffs, N.J.

Sereno, Kenneth K dan C. David Mortensen. (1970). *Foundations of Communication Theory*. New York: Harper & Row.

Shoemaker, Pamela J. and Stephen D. Reese. (1996). *Mediating the Massage: Theories of Influences on Mass Media Content*. 2nd edition. New York: Longman.

Varma, SP. (1982). *Modern Political Theory*. Oxford.

Yves R. Simon. (1962). *A General Theory of Authority*. University of Notre Dame Press.